



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.1081/DJPT.2/TU.330/IV/2024 16 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat Lanjutan Persiapan Delegasi RI Dalam Rangka
Menghadiri *S28 IOTC and Associated Meeting*

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan IOTC CIRCULAR 2023-08 perihal *Invitation to the 28th Session of the Indian Ocean Tuna Commission and Associated Meetings* (terlampir), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretariat *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* akan menyelenggarakan pertemuan *the 28th Session of the Indian Ocean Tuna Commission and Associated Meetings* (CoC21, SCAF21 dan TCMP08) pada tanggal 5 - 17 Mei 2024 secara luring/*offline* di Bangkok-Thailand.
2. Sebagai salah satu negara anggota *IOTC*, Indonesia wajib menghadiri pertemuan tersebut dengan tujuan meningkatkan peran aktif Indonesia pada pengelolaan perikanan di level regional dan mempertahankan kepentingan Indonesia terhadap pemanfaatan sumber daya tuna di Samudera Hindia.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan bekerja sama dengan Yayasan IPNLF Indonesia (YII) akan menyelenggarakan rapat persiapan Delegasi RI dalam rangka menghadiri *S28 IOTC and Associated Meeting* yang akan dilaksanakan

hari, tanggal : Kamis-Jumat, 18-19 April 2024
waktu : pukul 09.00 WIB – selesai
tempat : Gedung EDTC - Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB
Kampus IPB Jl. Pajajaran Raya No.1, RT.02/RW.05,
Baranangsiang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16127
agenda : Terlampir

4. Informasi terkait pembiayaan sebagai berikut:

- a. Biaya akomodasi, transportasi lokal dan uang harian untuk peserta lingkup pemerintah Jabodetabek ditanggung oleh YII.
- b. Untuk perwakilan industri, asosiasi dan Mitra KKP diharapkan hadir dengan pembiayaan dari organisasi masing-masing.

5. Konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri. Saraswati (HP/WA 085888360264).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran I

Nomor : B.1081/DJPT.2/TU.330/IV/2024

Tanggal : 16 April 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIUNDANG

Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP; (1 Orang)
2. Kepala Biro Hukum KKP; (1 Orang)
3. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap; (1 orang)
4. Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (1 orang)
5. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, DJPSDKP; (1 orang)
6. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, DJPSDKP; (1 orang)
7. Direktur Kepelabuhanan Perikanan, DJPT; (1 orang)
8. Direktur Perizinan dan Kenelayanan, DJPT; (1 orang)
9. Ketua Tim Kerja Kerja Sama, Setditjen PSDKP; (1 orang)
10. Ketua Tim Kerja Hukum, Setditjen PSDKP; (1 orang)
11. Ketua Tim Kerja Hukum, Setditjen Perikanan Tangkap; (1 orang)
12. Ketua Tim Kerja Kerja sama, Setditjen Perikanan Tangkap; (1 orang)
13. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas, Dit. PSDI, DJPT; (1 orang)
14. Ketua Tim Kerja Logbook dan Alokasi Kuota, Dit. PSDI, DJPT; (1 orang)
15. Ketua Tim Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Dit. PSDI, DJPT; (1 orang)
16. Muhammad Anas, S.Pi., M.S.E.M.A., Statistisi Muda, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap; (1 orang)
17. Hary Christijanto, A.Pi., M.Sc, Ahli Madya P3T, Dit.PSDI, DJPT; (1 orang)
18. Riana Handayani, S.Pi, Ahli Muda P3T, Dit.PSDI, DJPT; (1 orang)
19. Mumpuni Cyntia Pratiwi, S.Pi, M.S, Ahli Muda P3T, Dit.PSDI, DJPT; (1 orang)
20. Satya Mardi, S.Pi, Ahli Muda P3T, Dit.PSDI, DJPT; (1 orang)
21. Saraswati, S.Pi, Ahli Pertama P3T, Dit.PSDI, DJPT; (1 orang)
22. Lalu Lutfi Nizzami, S.St.Pi., Ahli Pertama P3T, Dit.PSDI, DJPT; (1 orang)
23. Virda Wulandari, S.Pi, Ahli Pertama P3T, Dit.PSDI, DJPT; (1 orang)
24. Ahmad Noval, A.Md, Pengelola Data, Dit. PSDI, DJPT; (1 orang)
25. Dwi Eni Juliastuti, A.Md., S.A.P., Pengelola Data, Dit.PSDI, DJPT; (1 orang)
26. Neneng, Pengelola Data, Dit. PSDI, DJPT; (1 orang)

Kementerian/Lembaga Terkait

27. Kepala Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); (1 orang)
28. Prof. Wudianto, Peneliti Utama pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); (1 orang)
29. Dr. Lilis Sadiyah, Peneliti Utama pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); (1 orang)
30. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI; (1 orang)
31. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Ditjen Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI; (1 orang)
32. Direktur Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, Kementerian Luar Negeri RI; (1 orang)

Pakar/Akademisi

33. Prof. Dr. Indra Jaya, Akademisi Institut Pertanian Bogor; (1 orang)
34. Prof. Dr. Luky Adrianto, Akademisi Institut Pertanian Bogor; (1 orang)

Mitra Kerja Pembangunan KKP/Asosiasi Perikanan

35. Yayasan IPNLF Indonesia; (1 orang)
36. Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia; (1 orang)
37. Yayasan Konservasi Alam Nusantara; (1 orang)
38. Konsorsium Tuna Indonesia; (1 orang)
39. Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia; (1 orang)
40. Asosiasi Perikanan Pole & line dan Handline Indonesia; (1 orang)
41. Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN); (1 orang)
42. Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI); (1 orang)
43. Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu (ASPERTADU); (1 orang)
44. Asosiasi Purse Seine Indonesia (APSI); (1 orang).

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

Lampiran II

Nomor : B.1081/DJPT.2/TU.330/IV/2024

Tanggal : 16 April 2024

Tentatif Agenda

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Kamis, 18 April 2024		
09.00 – 09.15	Arahan dan Pembukaan	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
09.15 – 09.45	Pengantar pertemuan <i>S28 IOTC and Associated Meetings</i>	Ketua Timja PSDI ZEEI dan Laut Lepas
09.45 – 12.00	Penyusunan kertas posisi delegasi RI pada pada pertemuan <i>21st Session of the Compliance Committee (CoC21)</i>	Riana Handayani, S.Pi., Ahli Muda P3T
12.00 – 13.00	ISTIRAHAT	
13.00 – 14.00	Penyusunan kertas posisi delegasi RI pada pertemuan <i>21st Session of the Standing Committee on Administration and Finance (SCAF21)</i>	Saraswati, S.Pi, Ahli Pertama P3T
14.00 – 16.00	Penyusunan kertas posisi delegasi RI pada pertemuan <i>8th Session of the Technical Committee on Management Procedures (TCMP08)</i>	BRIN
Jumat, 19 April 2024		
09.00 – 12.00	Penyusunan kertas posisi delegasi RI pada pertemuan <i>28th Session of the Indian Ocean Tuna Commission</i>	Ketua Timja PSDI ZEEI dan Laut Lepas
12.00 – 13.00		
13.00 – 16.00	Lanjutan Penyusunan kertas posisi delegasi RI pada pertemuan <i>28th Session of the Indian Ocean Tuna Commission</i>	Ketua Timja PSDI ZEEI dan Laut Lepas
16.00	Penutupan	

12 February 2024

IOTC CIRCULAR 2024-07

Dear Madam / Sir

INVITATION TO THE 28TH SESSION OF THE INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION & ASSOCIATED MEETINGS

I have the honour to extend to you an invitation to participate in the 28th Session of the Commission, which will be held from 13 to 17 May 2024.

The 21st Session of the Compliance Committee, the 21st Session of the Standing Committee on Administration and Finance and the 8th Session of the Technical Committee on Management Procedures will also be held in conjunction with the Commission meeting. Session dates are given below, in the Calendar of Important Dates.

All meetings will be held at the Swissotel Bangkok Ratchada, Thailand [[click here for information on this hotel](#)].

Note: The meetings will allow for physical participation and participation by videoconference. However, given meeting room size limitations, each observer organisation may only have a maximum of two persons in the meeting room at any one time.

Credentials

In accordance with Rule III of the IOTC Rules of Procedure, official credentials are required in order to participate in all the above meetings. Importantly, the letter of credentials shall conform with the draft letter provided in Appendix I of the IOTC Rules of Procedure [[click here](#)].

Only credentialed individuals will receive the Zoom links to join the meetings.

Credentials should be submitted to the Secretariat ASAP, but no later than 15 days before each meeting to iotc-secretariat@fao.org. Credentials for MPF applicants are required earlier.

Contracting Parties & Cooperating Non-contracting Parties (CPCs)

Each CPC is requested to provide a letter of credentials signed by the appropriate Authority indicating who will attend in-person and who should receive the Zoom link. The credentials should also include the email address and contact phone number for each person. It is important to duly authorise the alternate as shown in Appendix I, paragraph 3.

Observers

IOTC Observers are also requested to submit a similar Letter of Credentials indicating who will attend in-person and who should receive the Zoom link. The credentials should also include the email address and contact phone number for each person.

Meeting Participation Fund

The participation of one representative from developing Members of the IOTC to meetings will be supported through the IOTC Meeting Participation Fund (MPF).

- Applications to participate in the TCMP must be received by the IOTC Secretariat (iotc-secretariat@fao.org) no later than 45 days in advance of the meeting.
- Applications to participate in the CoC, SCAF and Commission meetings respectively must be received by the IOTC Secretariat (iotc-secretariat@fao.org) no later than 60 days in advance of the meeting.

Distribution

IOTC Contracting Parties: Australia, Bangladesh, China, Comoros, European Union, France (Territories), India, Indonesia, Iran (Islamic Rep of), Japan, Kenya, Rep. of Korea, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mozambique, Oman, Pakistan, Philippines, Seychelles, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, United Rep. of Tanzania, Thailand, United Kingdom, Yemen. **Cooperating Non-Contracting Parties:** Liberia. **Intergovernmental Organisations, Non-Governmental Organisations.** Chairperson IOTC. Copy to: FAO Headquarters, FAO Representatives to CPCs.

This message has been transmitted by email only

Given the limitations of the MPF budget it is proposed that eligible Members nominate one person to attend all four meetings. The rules of procedure for the administration of the MPF as well as guidelines for applying to the MPF can be found in Appendix VIII of the IOTC Rules of Procedure [[click here](#)]. Please be reminded that there is no provision in these rules for the IOTC Secretariat to consider late applications to the MPF.

Deadlines for MPF applications are shown on the below calendar.

Proposals for Conservation and Management Measures:

In accordance with the procedure agreed upon by the Commission in 2011, only those proposals for new or revised Conservation or Management Measures received thirty (30) days before the Session, at the latest, will be considered by the Commission. Thus, all proposals must be received by the IOTC Secretariat before midnight on 13 April, Seychelles time.

However, in accordance with Resolution 16/10, Contracting Parties are encouraged to submit a provisional title, Contracting Party sponsorship and a focal point for each proposal (including the email address of the focal point), a minimum of 60 days prior to each annual Session (i.e. 14 March) so that all Contracting Parties are provided with an opportunity to identify proposals being developed by other CPCs, and as appropriate, cooperate in the development of proposals prior to the Session in which they are to be discussed.

Proposals to amend the IOTC Rules of Procedure:

In accordance with Rule XVII of the IOTC Rules of Procedure, any proposals to amend the ROP must be distributed at least 60 days before the session of the commission i.e. 14 March.

Voting in a hybrid meeting

Voting by a roll call can be facilitated in a hybrid setting when all duly authorised voters are visible (i.e. in the meeting room or on-screen). For this type of vote, the procedures described in Rule X of the IOTC Rules of Procedure shall apply.

However, secret ballots will be conducted by in-person voting only. Accordingly, only duly authorized persons who are physically present at a meeting of the Commission may cast a secret vote and the procedures described in Rule X of the IOTC Rules of Procedure shall apply. Note, Members that are unable to attend the Session physically, are invited to include a person in their delegation to the Session of the Commission who is physically located in the country where the Session is being held (e.g. someone such as an embassy attaché), for the purpose of casting votes on their behalf. This person must be listed as the head of delegation or alternate on the letter of credentials to enable them to vote.

Meeting hours of the Commission

In May 2023, the Commission adopted a revised Rules of Procedure. One of the approved amendments in the newly adopted Rules of Procedure is Appendix V, which pertains to the work of the Compliance Committee.

The revised IOTC Rules of Procedure under Appendix V paragraph 6 states:

“IOTC Final Compliance Report

The Commission shall consider the IOTC Provisional Compliance Report and any associated or other relevant information, including responses to compliance issues and follow-up actions recommended by the Compliance Committee and adopt it, with amendments as required, as the IOTC Final Compliance Report.”

This new provision results in the need for the Commission to review and discuss the Preliminary Compliance Report developed during the preceding Session of the Compliance Committee. This additional requirement may take significant time. As such, I would like to extend the Commission meeting duration by an additional hour each day. This would ensure that time is not reduced for the other important points of the agenda.

Further information

Information concerning the meeting location and Sessions, including the agendas and other meeting documents will be communicated by the IOTC Secretariat in the coming weeks via Circulars and the IOTC website meeting pages [[click here](#)].

Yours sincerely

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.R. Kim', with a long horizontal flourish extending to the right.

Ms Jung-re Riley Kim
IOTC Chairperson

Calendar of important dates

Dates (2024)	Commission S28 (14-18 May)	Who	Notes
14 March	Deadline for receiving proposals to amend the IOTC Rules of Procedure (ROP XVIII.1)	CPs	It is preferable to receive any proposals before the 60 days distribution deadline (14 March) to allow for translation.
	Provisional agenda posted on the S28 meeting page (ROP IV.4)	Secretariat	60 days before the meeting
	Deadline for receiving applications from bodies seeking observer status (ROP XIV)	New observers	60 days before the meeting
	Deadline for MPF applications	Members	60 days before the meeting
13 April	Provisional agenda with comments posted on the S28 meeting page (ROP IV.4)	Secretariat	30 days before the meeting
	Deadline for receiving proposals for conservation and management measures (IOTC Agreement IV.4)	Members	30 days before the meeting. It is advisable that Members submit proposals that have been subject to advanced consultation (especially if the meeting is in a reduced format).
	Meeting documents posted on the S28 meeting page	Secretariat	ASAP but at least 30 days before the meeting
5-7 May	Compliance Committee		Deadline for credentials is 20 April* Deadline for MPF applications 6 March
8 May	Standing Committee on Administration & Finance		Deadline for credentials is 23 April* Deadline for MPF applications 9 March
9 May	Report adoption: COC21 & SCAF21		
10-11 May	Technical Committee on Management Procedures		Deadline for credentials is 26 April* Deadline for MPF applications 26 March
13-17 May	Commission (S28)		Deadline for credentials is 28 April* Deadline for MPF applications 14 March

* earlier if MPF is being requested



**PROVISIONAL AGENDA FOR THE
21ST SESSION OF THE COMPLIANCE COMMITTEE**

Date: 28 February 2024

Date: 05 – 07 May and 09 May, 2024

Location: Swissotel Bangkok Ratchada, Thailand (Hybrid)

Time: 09:00 – 17:00 hrs

Chairperson: Prof Indra Jaya, **Vice-chairperson:** Mr Zahor El Kharousy

05 - 07 May

1. Opening of the Session.
2. Letters of Credentials.
3. Admission of Observers.
4. Adoption of the Agenda and arrangements for the Session.
5. Report of the Working Party on the Implementation of Conservation and Management Measures (WPICMM07).
 - 5.1 Review of the IOTC Glossary of terms and definitions.
6. Reports of the Working Groups on:
 - 6.1 An IOTC Catch Documentation Scheme (CDS).
 - 6.2 An IOTC Vessels Monitoring System (VMS).
7. Review of the implementation of IOTC Conservation and Management Measures (CMMs) together with associated reports and identification of challenges encountered in the implementation of IOTC CMMs – Appendix V of the IOTC Rules of Procedure.
 - 7.1 Global review of selected CMMs.
 - 7.2 Review of CPCs Compliance Reports together with associated reports.
8. Review of new information on vessels included in the IOTC IUU Vessels List.
9. Review of the Draft IUU Vessels List – Res. 18/03.
10. Review of recommendations requiring intersessional actions, from CoC20.
11. Review of requests for the renewal of the status of Cooperating Non-Contracting Party - Appendix III of the IOTC Rules of Procedure.
12. Activities by the IOTC Secretariat in support of capacity building for CPCs – Res. 16/10.
13. Date and venue of next meeting.
14. Election of a Chairperson and Vice-chairperson of the Compliance Committee, for the next biennium.
15. Any Other Business.

09 May

16. Adoption of the Report of the 21st Session of the Compliance Committee.

IOTC–2024–SCAF21–01a[E]

**PROVISIONAL AGENDA FOR THE
21ST SESSION OF THE STANDING COMMITTEE ON ADMINISTRATION AND FINANCE**

Date: 8-9 May 2024

Location: Bangkok, Thailand

Chairperson: Mr Muhammad Farhan Khan (Pakistan)

Vice-Chairperson: Dr Muhammed Tanvir Hossain Chowdhury (Bangladesh)

- 1. LETTERS OF CREDENTIALS & ADMISSION OF OBSERVERS**
- 2. ADOPTION OF THE AGENDA**
- 3. REPORT OF THE SECRETARIAT: 2023**
 - 3.1 Report of the Secretariat on 2023 (IOTC-2024-SCAF21-02)
 - 3.2 Update on the requests made by the SCAF in 2023 (IOTC-2024-SCAF21-03 & IOTC-2024-SCAF21-09)
- 4. FINANCIAL STATEMENTS**
 - 4.1 Contributions Outstanding (IOTC-2024-SCAF21-04)
 - 4.2 IOTC Meeting Participation Fund (IOTC-2024-SCAF21-05)
 - 4.3 Financial Statement: Fiscal Year 2023 (IOTC-2024-SCAF21-06)
 - 4.4 Mid-term financial report 2024 (IOTC-2024-SCAF21-07)
- 5. PROGRAMME OF WORK AND BUDGET ESTIMATES FOR 2025 AND TENTATIVELY FOR 2026 (IOTC-2024-SCAF21-08)**
- 6. ANY OTHER BUSINESS**
 - 6.1 Feedback from the small Working group on MPF Rules and Procedure
- 7. ADOPTION OF THE REPORT OF SCAF21 (9 May)**

**PROVISIONAL AGENDA FOR THE
8TH SESSION OF THE TECHNICAL COMMITTEE ON MANAGEMENT PROCEDURES (TCMP08)**

V1 March 2024

Date: 10-11 May 2024

Location: Bangkok, Thailand (Hybrid)

Co-Chairs: Ms. Riley Kim Jung-re (Commission Chair) and Dr. Toshihide Kitakado (SC Chair)

- 1. OPENING OF THE SESSION AND ARRANGEMENTS (Co-Chairs)**
- 2. ADOPTION OF THE AGENDA AND ARRANGEMENTS FOR THE SESSION (Co-Chairs)**
- 3. ADMISSION OF OBSERVERS (Co-Chairs)**
- 4. DECISIONS OF THE COMMISSION RELATED TO THE WORK OF THE TECHNICAL COMMITTEE ON MANAGEMENT PROCEDURES (IOTC Secretariat)**
 - 4.1 Outcomes of the 7th Session of TCMP
- 5. INTRODUCTION TO MSE AND PRESENTATION OF MSE RESULTS**
- 6 STATUS OF THE MANAGEMENT STRATEGY EVALUATION/OPERATING MODELS AND ACTIONS NEEDED FOR ADOPTION (Developers)**
 - 6.1 Skipjack tuna (Charlie Edwards)
 - 6.2 Swordfish (Thomas Brunel/Iago Mosqueira)
 - 6.3 General Issues
 - 6.3.1 MP implementation, actions and regular implementation review
- 7 FUTURE DIRECTION OF THE TECHNICAL COMMITTEE ON MANAGEMENT PROCEDURES (Co-Chairs)**
 - 7.1 Workplan
 - 7.1.1 New timelines
 - 7.1.2 Budget and resources needed for technical developments
 - 7.1.3 External review
 - 7.2 Priorities
 - 7.3 Process and future meetings of TCMP
- 8 ADOPTION OF REPORT (Co-chairs)**

**PROVISIONAL AGENDA FOR THE
28TH SESSION OF THE INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION**

V2 April 2024

Date: 13-17 May 2024

Chairperson: Ms Jung-re Riley Kim (Rep. of Korea)

Vice Chairpersons: Mr Adam Ziyad (Maldives), Mr Qayiso Mketsu (South Africa)

- 1. OPENING OF THE SESSION**
- 2. LETTERS OF CREDENTIALS**
- 3. ADMISSION OF OBSERVERS**
- 4. ADOPTION OF THE AGENDA AND ARRANGEMENTS FOR THE SESSION**
- 5. DETERMINATION OF THE STATUS OF THE MEMBERSHIP OF THE UNITED KINGDOM IN THE IOTC**
- 6. UPDATE ON THE IMPLEMENTATION OF DECISIONS OF THE COMMISSION IN 2023 (S27) (IOTC-2024-S28-02)**
- 7. AMENDMENTS TO THE IOTC RULES OF PROCEDURE**
- 8. REPORT OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE (IOTC-2024-SC26-R)**
 - 8.1. Overview of the 2023 SC26 Report (SC Chairperson)
 - 8.2. Discussion on any related conservation and management measures
- 9. CONSERVATION AND MANAGEMENT MEASURES**

The following proposals for Conservation and Management Measures have been received:

PropA. On management of drifting fish aggregating devices (DFADs) in the IOTC area of competence (cf Res 19/02) – Korea

PropB. On climate change as it relates to the Indian Ocean Tuna Commission (cf Res 22/01) – Korea

PropC. On conservation and management on marine pollution – Korea

PropD. On establishing a programme for transshipment by large-scale fishing vessels (cf Res 23/05) – Korea

PropE - On the biodegradability of drifting fish aggregating devices (DFADs) in the IOTC area of competence – European Union

PropF - On establishing a list of vessels presumed to have carried out illegal, unreported and unregulated fishing in the IOTC area of competence (cf Res 18/03) – China

PropG - On a management procedure for swordfish in the IOTC area of competence – Australia

PropH – On a management procedure for skipjack tuna in the IOTC area of competence (cf Res 21/03) - European Union

PropI – On a regional observer scheme (cf 22/04) - European Union

PropJ – On the conservation of sharks caught in association with fisheries managed by IOTC (cf Res 17/05) - European Union

PropK – On management of drifting fish aggregating devices (FADS) in the IOTC area of competence (cf Res 19/02) - European Union

PropL – On a high seas boarding and inspection scheme – European Union

PropM - On establishing a fishing closure in the Indian ocean for the conservation of tropical tunas (cf Res 23/03) – European Union

PropN - On establishing a programme for transshipment by large-scale fishing vessels (cf 23/05) – Japan

PropO – Mandatory statistical reporting requirements for IOTC contracting parties and cooperating non-contracting parties (CPCS)(cf Res 15/02) - Seychelles

PropP - On the recording and reporting of catch and effort data by fishing vessels in the IOTC area of competence (cf Res 15/01)- Seychelles

PropQ - On a ban on discards of bigeye tuna, skipjack tuna, yellowfin tuna, and non- targeted species caught by vessels in the IOTC record of authorisation that operate in the iotc area of competence - Seychelles

PropR - On management of drifting fish aggregating devices (DFADs) in the IOTC area of competence (cf. Res 19/02) – (Indonesia, Pakistan, Somalia and South Africa)

PropS - On establishing a programme for transshipment by large-scale fishing vessels (cf. Res 23/05) (Indonesia)

PropT - On the promotion of the implementation of IOTC conservation and management measures (cf Res 14/01, Res 16/10) – South Africa

PropU - On an interim yellowfin tuna rebuilding plan (cf Res 21/01) – Pakistan, South Africa and Iran

PropV – On the conservation of sharks caught in association with fisheries managed by IOTC (cf Res 12/09, 13/05, 13/06, 17/05 and 18/02) – Maldives and Pakistan

PropW – On measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (cf 07/01 and 18/03) – Somalia

PropX - To promote compliance by nationals of contracting parties and cooperating non-contracting parties with IOTC conservation and management measures (cf Res 07/01) – United Kingdom

- 9.1. Current Conservation and Management Measures that require action by the Commission in 2024 (IOTC-2024-S28-03)
- 9.2. Review of objections received under Article IX.5 of the IOTC Agreement (IOTC-2024-S28-04)
- 9.3. Proposals for new or revised Conservation and Management Measures (noting that, some proposals will be considered under other agenda items, as relevant).

10. REPORT OF THE TECHNICAL COMMITTEE ON ALLOCATION CRITERIA (IOTC-2023-TCAC12-R)

- 10.1. Overview of the TCAC12 Report (TCAC Chairperson)
- 10.2. Future Direction of the TCAC
 - IOTC-2024-S28-07 - *Working towards further progress on the development of an allocation of fishing opportunities for IOTC species (South Africa)*
- 10.3. Election of TCAC Chair

11. REPORT OF THE TECHNICAL COMMITTEE ON MANAGEMENT PROCEDURES

- 11.1. Overview of the TCMP07 and TCMP08 Reports (TCMP Chairpersons)

12. REPORT OF THE COMPLIANCE COMMITTEE (IOTC-2024-CoC21-R)

- 12.1. Overview of the CoC21 Report (CoC Chairperson)
- 12.2. Adoption of the List of IUU Vessels
- 12.3. Requests for accession to the status of Cooperating non-Contracting Party
- 12.4. Review of CPCs Compliance Reports

13. REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON ADMINISTRATION AND FINANCE (IOTC-2024-SCAF21-R)

- 13.1. Overview of the SCAF21 Report (SCAF Chairperson)
- 13.2. SCAF feedback on draft rules of Procedure for the IOTC Meeting Participation Fund
- 13.3. Adoption of the Programme of Work and Budget of the Commission (see also IOTC-2024-SCAF21-08)
- 13.4. Schedule of meetings for 2025-2026

14. ANY OTHER BUSINESS

- 14.1. Cooperation with other organisations and institutions (IOTC-2024-S28-05)
- 14.2. Proposal for a Code of Conduct for IOTC Meetings (IOTC-2024-S28-06)
- 14.3. Date and place of the first session of the Working Party on Socio Economics

14.4. Date and place of the 29th Session of the Commission and the meetings of its associated subsidiary bodies in 2025

15. ADOPTION OF THE REPORT OF THE 28th SESSION OF THE COMMISSION

LAPORAN TAHUNAN IOTC 2024

28TH SESSION OF THE INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION

TANGGAL 05-17 MEI 2024

RINGKASAN BERITA

Delri telah menghadiri *the 28th Session of the Indian Ocean Tuna Commission and Associated Meetings* yang terdiri dari pertemuan *the 21st Session of the Compliance Committee (CoC21)* pada tanggal **5-7 dan 9 Mei**, *Pertemuan the 21st Session of Standing Committee on Administration and Finance (SCAF21)* pada tanggal **10 Mei**, *Pertemuan the 8th Session of Technical Committee on Management Procedure (TCMP08)* pada tanggal **11-12 Mei**, dan *Pertemuan the 28th Session of the Indian Ocean Tuna Commission (S28)* pada tanggal **13-17 Mei** di Bangkok, Thailand.

Pertemuan Komisi IOTC S28 mendengarkan dan mengesahkan laporan pertemuan yang telah dilaksanakan sebelumnya termasuk laporan pertemuan CoC21, SCAF21 dan TCMP08. Pertemuan Komisi IOTC S28 ini dihadiri oleh 29 perwakilan CPCs (*Cooperating Non-Contracting Parties*) dan 14 perwakilan NGO lokal maupun internasional.

Merujuk perihal tersebut pada pokok berita, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. IOTC merupakan organisasi antar pemerintah di bawah naungan FAO yang diberi mandat untuk melakukan pengaturan terhadap berbagai spesies ikan tuna di kawasan Samudera Hindia dan laut-laut yang berdekatan dengan wilayah tersebut. Saat ini, IOTC terdiri dari 29 negara anggota (*Contracting Parties*) dan 1 negara non-anggota (*Cooperating Non-Contracting Parties*).
2. Delri telah menghadiri rangkaian pertemuan rutin IOTC 2024 di Bangkok, terdiri dari:
 - a. *the 21st Session of the Compliance Committee (CoC21)* pada tanggal 5-7 dan 9 Mei
 - b. *the 21st Session of Standing Committee on Administration and Finance (SCAF21)* pada tanggal 10 Mei
 - c. *the 8th Session of Technical Committee on Management Procedure (TCMP08)* pada tanggal 11-12 Mei
 - d. *the 28th Session of the Indian Ocean Tuna Commission (S28)* pada tanggal 13-17 Mei.
3. Delri telah dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) ZEEI dan Laut Lepas Direktorat SDI-DJPT, KKP. Anggota Delri terdiri dari berbagai unit terkait Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRIN, Kementerian Luar Negeri, KBRI Bangkok, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB serta perwakilan dari pelaku usaha perikanan Indonesia.
4. ATLI telah mengirim 1 perwakilan Richi Richado (Ketua pengurus Bidang Tuna) ke pertemuan IOTC di siding komisi (13-17 Mei).

Pertemuan the 28th Session of the Indian Ocean Tuna Commission (S28)

1. Pertemuan Sidang Komisi IOTC merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi guna memastikan pengelolaan dan konservasi serta pemanfaatan stok sumber daya ikan di dalam wilayah kompetensi IOTC.
2. Pertemuan Sidang Komisi IOTC ke-28 dipimpin oleh Korea Selatan, serta dihadiri oleh 29 perwakilan CPCs (*Cooperating Non-Contracting Parties*) dan 14 perwakilan NGO lokal maupun internasional sebagai *international observer* (termasuk *invited experts*).
3. Pertemuan Sidang Komisi IOTC ke-28 juga telah mengesahkan laporan pertemuan dari komite-komite yang ada di bawah IOTC termasuk *Scientific Committee (SC)*, *Compliance Committee (CoC)*, *Standing Committee on Administrative and Finance (SCAF)*, *Conservation and Management Measures (CMMs)*, dan juga *technical Committee on Allocation Criteria (TCAC)*. Pertemuan ini juga berhasil memilih dan menetapkan *Chair* atau Ketua Komite untuk TCAC dimana Prof. Quentin Hanich dari Australia terpilih sebagai Ketua Komite TCAC.
4. Pada agenda pembahasan *Adoption of the list of IUU Vessels*, Indonesia berhasil mengeluarkan Kapal BELMETI dari *provisional IUU Vessels List* IOTC sehingga tidak masuk kedalam *IUU vessel List* IOTC. Indonesia dan Australia akan terus melakukan pertemuan secara *Intersessional* untuk pembahasan lanjut atas isu terkait kapal BELMETI yang telah melakukan kegiatan *IUU fishing* di wilayah perairan Australia.
5. Pada pertemuan Komisi IOTC S28, terdapat 24 proposal usulan resolusi dari negara anggota terkait isu *tropical tuna*, *drifting fish aggregating devices (DFADs)*, *High Seas Boarding and Inspection (HSBI)*, *IUU Fishing*, *Transshipment*, *Regional Observer*, *Shark Conservation*, *Catch and Effort Reporting* dan *Ecosystem and Bycatch*.
6. Pertemuan Komisi IOTC S28 berhasil mengesahkan dan mengadopsi 16 dari 24 proposal ke dalam 11 Resolusi dan 1 Rekomendasi. Indonesia berhasil mendorong adopsi atas 2 (dua) proposalnya, yakni *proposal on establishing the programme for transshipment by large-scale fishing vessels*, dan *proposal on management of drifting fish aggregating devices in the IOTC area of competence* yang diusung bersama dengan Pakistan, Somalia, Afrika Selatan, dan Maldives.

Catatan dan Saran Tindak Lanjut

7. Secara keseluruhan rangkaian pertemuan *the 28th Session of the Indian Ocean Tuna Commission and Associated Meetings* berlangsung sangat dinamis dan berakhir dengan lancar, dengan jumlah partisipasi kehadiran secara *in-person* cukup tinggi. Ketua Komisi S28 dan Sekretariat IOTC mengapresiasi Direktur Jenderal Perikanan Thailand atas kesediaannya menjadi tuan rumah pertemuan dan juga atas partisipasi secara keseluruhan dari semua negara anggota maupun *international observer* yang hadir atas intervensi dan kerja samanya pada setiap mata agenda pertemuan.
8. Pertemuan tetap diwarnai oleh perbedaan posisi dan prioritas setiap negara dalam isu *conservation measures*. Namun demikian, pertemuan menyepakati dibutuhkannya skema kerja sama perikanan tuna guna mencegah *overfishing* dan memastikan manajemen perikanan tuna yang berkelanjutan.

→ Dalam kaitan penurunan stok *yellowfin tuna* di Samudera Hindia, rencananya akan dilakukan pertemuan khusus pembahasan ini tahun 2025 (diperkirakan setelah sidang komisi ke-29) berdasarkan hasil *stock assessment* pada bulan Desember 2024.

9. Terkait dengan telah diadopsinya proposal Indonesia *on establishing the programme for transshipment by large-scale fishing vessels*, Pemerintah Indonesia bersama dengan pengusaha perikanan Indonesia perlu memastikan kelancaran dan penyelesaian *Pilot project* Indonesia terkait alih muatan di laut yang akan dievaluasi pada tahun 2025. Hal ini perlu didukung dengan pelaporan dan penilaian yang memadai untuk disampaikan pada pertemuan Sidang Komisi IOTC ke-29.

→ *Pilot project* ini dimaksudkan agar program observer nasional dapat diintegrasikan kedalam Program Observer Regional IOTC. Keberhasilan *pilot project* tersebut akan menjamin keberlanjutan pemanfaatan observer nasional dalam kegiatan alih muatan di laut untuk kapal *longline* Indonesia di wilayah kompetensi IOTC.

10. Pemerintah Indonesia (KKP) bekerja sama dengan Sekretariat *Regional Plan of Action to promote responsible fishing practices including combating IUU Fishing* (RPOA IUU) dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha perikanan di pusat dan daerah, perlu berkoordinasi lebih lanjut terkait pengelolaan kapal perikanan dan wilayah penangkapan, dalam rangka penyelesaian kasus Kapal BELMETI dengan Pemerintah Australia.

11. Kenaikan kontribusi tahunan Indonesia pada tahun 2025 kiranya sulit untuk dicegah. Sebagaimana dimaklumi, perhitungan kontribusi negara anggota IOTC dipengaruhi oleh *Base Contributions*, *GNI Contributions*, dan *Catch Contribution*. *Catch Contribution* dihitung berdasarkan rata-rata hasil tangkapan tuna dan sejenisnya pada 3 (tiga) tahun sebelumnya. Dalam hal ini, **GNI Contribution Indonesia naik dari USD 36.682 pada TA 2024 menjadi USD 39.128 untuk TA 2025. Rata – rata hasil tangkapan tuna Indonesia pada tahun 2020-2023 yang menjadi perhitungan kontribusi TA 2025, naik menjadi 462.291 metrik ton dari 425.860 metrik ton di tahun 2019-2022.**

12. Sidang Komisi IOTC ke-28 menetapkan bahwa Sidang Komisi IOTC ke-29 akan diselenggarakan pada tanggal 7-17 April tahun 2025 di La Reunion.

13. Berbagai dokumen persidangan ini dapat diakses pada tautan berikut: <https://iotc.org/meetings/28th-session-indian-ocean-tuna-commission>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.